

Pegawai Pemprov Bali Mulai Aturan Baru Kerja Sampai 16.30 WITA

Pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memulai aturan baru yang termuat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 yaitu melaksanakan jam kerja dari pukul 07.30 Wita hingga 16.30 Wita.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu, menyampaikan kebijakan tentang hari dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN di Pemprov Bali ini sudah disosialisasikan sejak Desember lalu dan saat ini sudah mulai diterapkan.

"Sudah diketahui dan disosialisasikan kepada semua pegawai secara daring. Jadi pegawai dengan waktu kerja reguler yang sebelumnya pulang pukul 15.30, sekarang menjadi pukul 16.30 karena dipotong jam istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00 Wita," kata dia.

Aturan ini untuk mempertegas berapa lama waktu istirahat, sehingga kewajiban 8 jam kerja dalam sehari dan 37,5 jam dalam

seminggu, kecuali di hari Jumat dengan jam istirahat 90 menit dan total jam 5 jam 30 menit dapat terpenuhi.

Sekda Dewa Indra mengatakan aturan Pemprov Bali ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara, yang telah ditetapkan pada April 2023.

"Sebelumnya jam kerja pegawai Pemprov Bali diatur dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000, dengan ditetapkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2023, keputusan gubernur tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,"



Dokumentasi Sekda Bali Dewa Made Indra saat diwawancarai di Denpasar. ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

ujar birokrat tersebut.

Dengan ini maka sudah ditetapkan mulai Selasa (2/1/2024) pada hari biasa para pegawai menyesuaikan dengan jam baru yaitu pukul 07.30 Wita hingga 16.30 dengan hari kerja yang tidak berubah.

Sementara di bulan Ramadan, jam kerja instansi pemerintah

dimulai pada pukul 08.00 WITA dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 32 jam 30 menit dalam seminggu, tidak termasuk jam istirahat.

"Bagi pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai," kata Dewa Indra. (ant)

Dispar Bali Siapkan Dialog Dengan Penyedia Jasa Taksi Pariwisata

DINAS Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali sedang menyiapkan pertemuan dengan para penyedia jasa angkutan taksi yang beroperasi di kawasan pariwisata, ini guna memberi pembinaan terhadap asosiasi agar menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan.

"Kami berencana dalam waktu dekat akan berkomunikasi dan mengundang penyedia jasa angkutan taksi atau kami akan ke sana untuk menyampaikan seperti apa seharusnya penyedia taksi memenuhi standar layanannya," ujar Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Jumat.

Upaya tersebut dilakukan un-

tuk mengantisipasi terulangnya kejadian negatif yang dilakukan oknum sopir taksi seperti kasus pemerasan terhadap wisatawan mancanegara yang viral beberapa waktu lalu yang dapat mempengaruhi citra pariwisata Pulau Dewata.

"Sopir taksi itu harus terdaftar dengan pasti selain armada taksinya juga harus terdeteksi posisinya dimana. Semua akan segera

kami ajak berdiskusi karena pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti ini. Dan bagi perusahaan sendiri, isu seperti itu juga sangat merugikan mereka," ujarnya.

Tjok mengatakan Pemprov Bali berupaya menunjukkan bahwa kegiatan kepariwisataan yang ada itu aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan, maka dari itu dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bersama-sama menjaga Bali.

Menurutnya semua pihak harus bisa memberikan jaminan wisatawan agar bisa berwisata dengan aman dan nyaman karena setiap peristiwa yang terjadi

di Bali informasinya akan cepat menyebar di dunia internasional.

"Kami minta teman-teman asosiasi pariwisata agar menginformasikan kepada wisatawan yang dilayani terkait apa yang boleh dilakukan di Bali mana yang tidak. Hal yang sama itu juga diinformasikan oleh asosiasi penyewa kendaraan kepada wisatawan yang menyewa," kata dia.

"Kemudian untuk taksi manajemennya juga harus mengingatkan sopirnya apa yang harus dilakukan dalam melayani wisatawan," sambung Kepala Dispar Bali asal Gianyar itu.

Nantinya, setelah melakukan pertemuan tersebut akan diputuskan langkah yang akan dilakukan seperti membuat buku saku atau surat panduan bagi para manajemen dan sopir taksi dalam melakukan pelayanan terhadap wisatawan. (ant)



Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun saat diwawancarai soal rencana pertemuan dengan penyedia angkutan taksi pariwisata di Denpasar, Jumat (12/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

Wali Kota Denpasar: Suasana Kondusif Jelang Pemilu Jadi Prioritas

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengajak masyarakat di Ibu Kota Provinsi Bali itu untuk senantiasa menjaga suasana tetap kondusif di setiap wilayahnya dan harus menjadikannya sebagai prioritas, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita harus saling menghargai. Silakan beda pilihan, tetapi kondusifitas Denpasar menjadi prioritas,” kata Jaya Negara di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, apalagi Kota Denpasar merupakan daerah pariwisata sehingga situasi wilayah yang kondusif sangat dibutuhkan.

“Kami memiliki keyakinan penuh pelaksanaan pemilu akan kondusif karena warga Kota Denpasar sudah teruji dalam setiap pelaksanaan pilkada ataupun pemilu. Mudah-mudahan pemilu kali ini juga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Jaya Negara juga berharap warga Kota Denpasar dapat menggunakan hak pilihnya den-



gan baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan partisipasi pemilih bisa meningkat dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya.

Pihaknya pun tengah melakukan evaluasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

“Partisipasi pemilih saat Pilpres dan Pileg 2019 yang lalu 72 persen sedangkan saat pilkada 54 persen,” ucapnya.

Jaya Negara mengatakan salah satu tantangan pemilih di Kota Denpasar karena hanya sekitar 65 persen dari pemegang kartu penduduk (KTP) di Kota Denpasar yang memang benar-benar warga



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Denpasar, Bali, Kamis (11/1/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

asli Kota Denpasar. Sedangkan yang tidak asli Denpasar, ujar dia, mereka tidak jarang ikut pulang ke daerah asalnya dan meningkatkan Kota Denpasar saat pemilu. Selain itu, kata Jaya Negara, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan.

“Mungkin juga ada program pemerintah yang perlu ditingkatkan,” katanya.

Jaya Negara berharap dengan berbagai upaya yang telah dilakukan KPU dan evaluasi program pemerintah, maka partisipasi pemilih di Kota Denpasar bisa meningkat. **(ant)**

328 Warga Denpasar Manfaatkan Layanan Jemput Bola Pembuatan E-KTP



Sejumlah masyarakat Denpasar saat memanfaatkan layanan serentak pembuatan KTP elektronik di Denpasar, Minggu (14/1/2024). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

SEBANYAK 328 warga di Kota Denpasar, Bali, tercatat telah memanfaatkan layanan jemput bola pelayanan serentak pembuatan KTP elektronik yang tersebar di empat kecamatan di kota setempat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar Dewa Gde Juli

Artabrata di Denpasar, Minggu, disela-sela kegiatan mengatakan pihaknya terus mendorong kepemilikan identitas kependudukan bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat.

“Hal ini guna mendukung terciptanya data kependudukan yang valid di Kota Denpasar. Terlebih saat ini menjelang pelaksanaan Pemili-

han Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” ujar Dewa Juli.

Jemput bola pelayanan serentak pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat Kota Denpasar itu dipusatkan di beberapa titik, yakni Kelurahan Peguyangan (Kecamatan Denpasar Utara), Desa Dauh Puri Kangin (Kecamatan Denpasar Barat), Kantor Camat Denpasar Selatan dan Kelurahan Sumerta (Kecamatan Denpasar Timur).

Dari 328 masyarakat yang memanfaatkan layanan serentak itu terbagi menjadi yang melakukan perekaman KTP elektronik usia 16 tahun sebanyak 101 orang, rekam KTP elektronik usia 17 tahun sebanyak 54 orang, dan cetak KTP elektronik sebanyak 48 orang.

Kemudian cetak revisi sebanyak 46 orang, print ready record/status sudah siap cetak (PRR) sebanyak 3 orang dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sebanyak 76 orang.

Dewa Juli menambahkan, selain untuk mendukung validasi data dan melindungi hak pilih masyarakat, percepatan kepemilikan identitas KTP elektronik ini juga mengacu pada target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian masyarakat yang hendak mengurus KTP elektronik dapat memanfaatkan pelayanan di beberapa titik. Mulai dari pelayanan di masing-masing kecamatan, jemput bola di setiap desa/kelurahan, dan jemput bola di masing-masing sekolah.

“Jadi lokasi pelayanan juga sudah banyak, tentu sebagai identitas diri, KTP elektronik memiliki manfaat yang mendasar, termasuk salah satunya melindungi hak pilih saat pemilu dan pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selain juga untuk memastikan semua masyarakat telah memiliki KTP elektronik sesuai target nasional,” ujarnya. **(ant)**

Wali Kota Denpasar Minta Tetap Waspada Ancaman Peredaran Narkoba

WALI Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengajak masyarakat untuk tetap waspada dengan peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius.

"Seperti yang kita tahu, sekarang banyak cara yang dilakukan oknum untuk penyebaran narkoba. Kewaspadaan kita tetap harus dijaga," kata Jaya Negara saat menerima piagam penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar, di Denpasar, Senin.

Jaya Negara dalam kesempatan tersebut menerima piagam penghargaan atas peran aktif fasilitasi dan implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) dari BNN Kota Denpasar.

"Saya mengajak semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda untuk bersama memerangi narkoba sehingga penyebarannya dapat dicegah,"



ucapnya. Pemerintah Kota Denpasar juga serius melakukan upaya pencegahan dan peredaran narkotika. Peran serta dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan pemberantasan narkotika, dilakukan hingga ke jenjang kecamatan. Kegiatan itu dilakukan untuk mewujudkan Kota Denpasar Bersih Narkoba (Bersinar).

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Kombes Pol I Ketut Adnyana menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap peran serta dan keaktifan Pemkot Denpasar, serta berbagai unsur masyarakat dalam pencegahan P4GN.

"Partisipasi dari jenjang kecamatan, hingga desa/kelurahan dengan mengikutsertakan warga masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Denpasar, kami nilai efektif dalam mendukung pemberantasan narkoba," ujarnya.



Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Kombes Pol I Ketut Adnyana di Denpasar, Senin (15/1/2024). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Ia menambahkan, BNN Kota Denpasar terus berkomitmen untuk pemberantasan narkoba di Kota Denpasar. Beragam langkah terus dioptimalkan, salah satunya dengan melahirkan Desa Bersinar.

Dengan demikian masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba.

"Kami upayakan merangkul

semua elemen masyarakat, dalam berbagai kegiatan seperti dialog remaja oleh SMA/SMK yang berada di wilayah Desa Bersinar dan kegiatan ketahanan keluarga oleh kader PKK di Desa Bersinar," ujarnya.

Selain Wali Kota Denpasar, penghargaan dari BNN Denpasar ini juga diterima empat kecamatan di Kota Denpasar. (ant)

Denpasar Siapkan Program Inovasi Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi



Wali Kota Denpasar IG N Jaya Negara didampingi Sekda Denpasar IB Alit Wiradana dan Kepala Dinas Sosial Denpasar IGA Laxmy Saraswati berfoto bersama perwakilan penerima bantuan sembako di Denpasar, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, menyiapkan program inovasi bagi perempuan rawan sosial ekonomi di kota itu agar upaya pemberdayaan lebih maksimal dengan sumber pendanaan melalui APBD setempat.

"Sekarang kami sedang mengkaji, perempuan rentan sosial ekonomi ini apakah tetap

mendapat PKH (program keluarga harapan) atau mendapat program yang didanai dari APBD karena jumlahnya tidak banyak," kata Wali Kota Denpasar IG N Jaya Negara di Denpasar, Kamis.

Jaya Negara menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada kelompok masyarakat

yang masuk kategori perempuan rawan sosial ekonomi di Kota Denpasar.

Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan kaum perempuan berusia 18-59 tahun yang menanda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau mereka yang sudah menikah dan menjadi tulang punggung keluarga meskipun bukan berstatus janda karena suaminya tidak mampu bekerja.

Termasuk juga perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah dan sebagai kepala keluarga serta tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Ada juga yang suaminya sakit, anaknya meninggal. Ini kan mereka tidak ada yang merawat. Ini mereka kelompok perempuan rentan Jika mengandalkan PKH,

kayaknya tidak bisa dengan Rp300 ribu untuk tiga bulan. Ini akan kami evaluasi," ucap Jaya Negara.

Terkait dengan formula yang akan digunakan, masih akan dipelajari terlebih dahulu supaya tidak sampai salah atau bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat karena mereka selama ini sudah mendapatkan bantuan PKH.

"Intinya akan membuat program inovasi dari Dinas Sosial untuk kelompok perempuan rentan ini dengan membuat pemberdayaan yang lebih maksimal," katanya.

Program inovasi bagi perempuan rawan sosial ekonomi itu rencananya akan mulai dilaksanakan melalui anggaran perubahan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2024. Jaya Negara mencontohkan dengan 300-an orang dan bisa diberikan bantuan Rp1 juta sebulan, maka dalam setahun jumlahnya tidak terlalu besar. (ant)

Pemkab Badung Terapkan Sewa Kendaraan Dinas Untuk Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali menerapkan kebijakan baru dalam pengadaan kendaraan operasional bagi pimpinan perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Badung dengan sistem sewa mulai tahun anggaran 2024 untuk efisiensi anggaran.

“Mulai tahun anggaran 2024 untuk kegiatan pengadaan kendaraan operasional pimpinan perangkat daerah, kami bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem sewa,” ujar Kepala Bagian Umum Setda Badung I Nyoman Artaka di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan sesuai arahan pimpinan, Pemkab Badung melakukan peremajaan kendaraan operasional bagi pimpinan organisasi perangkat daerah dan kepala bagian mengingat usia kendaraan operasional yang telah berusia enam tahun dengan pengadaan terakhir pada 2017.

Akan tetapi, untuk tahun

ini Pemkab Badung tidak lagi melakukan pembelian kendaraan yang akan menjadi aset, melainkan dengan sistem sewa tersebut.

Nyoman Artaka menjelaskan dengan diberlakukannya sistem sewa maka akan dapat dilakukan efisiensi anggaran khususnya dalam pemeliharaan kendaraan operasional.

“Kamu tinggal menggunakan saja, untuk pemeliharaan seperti perbaikan,

servis, ganti oli ganti ban, dan lainnya menjadi tanggung jawab rekanan. Mobil ini juga sudah dijamin asuransi, yang juga menjadi kewajiban rekanan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan selama ini untuk pemeliharaan 58 unit kendaraan operasional bagi pimpinan perangkat daerah dan kepala bagian telah menggunakan anggaran sebesar



Kepala Bagian Umum Setda Badung I Nyoman Artaka di Mangupura, Rabu (3/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung.

sar Rp2,3 miliar lebih per tahun.

Efisiensi lain juga dari anggaran pengadaan, jika dengan membeli untuk menjadi aset pemerintah dibutuhkan anggaran Rp37,3 miliar lebih, sedangkan dengan sistem sewa, anggaran yang dibutuhkan sesuai kontrak dengan rekanan senilai Rp11,5 miliar lebih.

Menurut Nyoman Artaka, sistem sewa kendaraan operasional itu juga telah digunakan oleh sejumlah pemerintah daerah di Bali, termasuk oleh instansi pemerintah pusat.

“Kerja sama dengan rekanan leasing yang dipilih berdasarkan E-Katalog ini menggunakan kontrak payung dengan kontrak diperpanjang setiap tahun selama lima tahun,” kata dia. (adv)

Pemkab Badung Minta Jajaran OPD Cepat Tanggapi Keluhan Masyarakat



Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat cepat menanggapi dan memberikan keluhan serta pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

“Pengaduan masyarakat di media sosial ini seperti terkait

sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.

Menurut dia, kinerja semua OPD harus digenot lagi di tahun 2024, sehingga apabila ada keluhan, OPD bisa mencari solusi

dan mengeksekusi dengan cepat

Ia mengatakan pihaknya juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Adi Arnawa menambahkan, jajaran pimpinan di Badung memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja Pemerintah Kabupaten Badung.

“Digitalisasi birokrasi, meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun sesuai arahan Menteri PANRB, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi tapi mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di se-

luruh OPD dalam satu platform aplikasi,” kata dia.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan selama ini kinerja OPD sudah baik dalam melaksanakan visi misi pimpinan di Badung, namun pihaknya terus mendorong agar seluruh jajaran tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Terlebih Badung ini merupakan tujuan pariwisata internasional tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kami fokuskan,” kata dia.

Untuk itu, ia juga meminta jajaran organisasi perangkat daerah agar dapat melakukan optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dalam hal pelayanan publik salah satunya dengan digitalisasi terintegrasi. (adv)

Pemkab Badung Buka Jalan Pintas Cangggu-Tibubeneng

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, resmi membuka jalur shortcut Cangggu-Tibubeneng untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan wisata di wilayah Badung Utara tersebut.

"Ini merupakan salah satu program kami untuk mengurai kemacetan. Kami pastikan setelah jalur ini dibuka untuk kepentingan umum, lalu lintas bisa menjadi lancar tidak macet seperti sebelumnya," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat peresmian jalur tersebut di Badung, Rabu.

Jalur shortcut Cangggu-Tibubeneng yang berlokasi di simpang Padonan itu memiliki panjang 335 meter dengan lebar 8 meter yang dilengkapi dengan pedestrian dan dibangun di atas tanah seluas 26 are.

Jalan itu dibangun dengan menggunakan anggaran dana APBD perubahan 2023 Kabupaten Badung sebesar Rp6,2 miliar un-

tuk proyek jalan dan Rp25 miliar untuk pembebasan lahan, dengan waktu pengerjaan kurang lebih dua bulan

Bupati Giri Prasta mengatakan pihaknya berterima kasih kepada para pemilik lahan yang telah memberikan dukungan penuh terkait dengan program shortcut Tibubeneng Cangggu itu.

Menurut dia, proses sosialisasi pembebasan lahan untuk jalan shortcut tersebut sebelumnya telah berjalan dengan waktu yang lama, namun waktu eksekusi pembangunannya berjalan dengan cepat.

"Kami bersyukur bisa segera melakukan ini sehingga betul-betul kemacetan yang terjadi di kawasan destinasi wisata ini bisa terurai," kata dia.

Ia menambahkan, sebagai upaya lain untuk mengatasi masalah kemacetan di Badung, pihaknya bersama pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa dan Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Warsono meresmikan Jalan Shortcut Cangggu Tibubeneng, Kuta Utara, Rabu (10/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

rencana pembangunan moda transportasi LRT/MRT untuk mewujudkan sistem transportasi umum yang berkelanjutan.

"Besok tim Kabupaten Badung bersama tim pemerintah pusat akan datang dari Korea berkaitan

dengan MRT. Kami sudah mohonkan untuk pembangunan MRT, kita harus memperhitungkan Bali 1.000 tahun kemudian, berawal dari satu tahun ini, untuk menyediakan sistem transportasi skala besar di bawah tanah. (adv)

Pemkab Badung Pinjamkan Gedung Satu Area ke KPU dan Bawaslu



KPU dan Bawaslu RI bersama Pemprov Bali dan Pemkab Badung di jembatan Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata saat giat serah terima pakai gedung KPU dan Bawaslu Badung di Denpasar, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung melakukan serah terima pinjam pakai Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, yaitu gedung berdampingan dalam satu area untuk KPU dan Bawaslu Badung, dimana dalam penyerahannya turut hadir Ketua KPU RI

Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Subagja.

Di Denpasar, Kamis, Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan bahwa sejatinya gedung berdampingan ini dirancang sejak 2018 lalu, namun COVID-19 menghambat ekonomi mereka.

Akhirnya pulihnya pariwisata membuat proyek ini berlanjut dan Pemkab Badung menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam membantu fasilitasi KPU dan Bawaslu.

"Itulah maka kami hadir, Pemkab Badung menghadirkan Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata ini, memberikan fasilitas untuk penyelenggara pemilu dengan anggaran Rp29,666 miliar," kata dia menyebutkan.

Lebih jauh gudang logistik hingga ruang bawah tanah akan disiapkan agar rampung seluruhnya tahun ini, sehingga Kabupaten Badung dapat menjadi percontohan di tingkat nasional. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan terima kasihnya, lantaran tak dapat dipungkiri di beberapa daerah masih ada penyelenggara pemilu yang bekerja dengan kantor yang belum memadai.

"Pada kesempatan ini begitu melihat bangunan KPU dan Bawaslu Badung tentu saja mem-

buat kita takjub dan menyukuri nikmat yang diberikan Tuhan melalui Pak Bupati Badung, ini bisa menjadi contoh model bagi pemerintah daerah lain," kata dia.

Dengan adanya gedung berdampingan yang megah di Jalan Kebo Iwa, Denpasar, ini Ketua KPU RI itu meminta jajarannya di Kabupaten Badung membalas dengan bekerja lebih maksimal dan berkomitmen dalam melayani.

"Mesti menjadi pemacu, penyemangat, untuk melayani pemilih agar dapat menggunakan hak pilih dan juga melayani peserta pemilu untuk berkompetisi secara baik. Sehingga tugas pokoknya sebagai lembaga layanan dilaksanakan secara optimal," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dimana dirinya senang karena Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata yang dibangun Pemkab Badung ini rampung pembangunannya sebelum Pilkada 2024, lantaran rawan permasalahan. (adv)

Bupati Badung Beri Hadiah Dana Untuk Atlet Disabilitas Berprestasi

BUPATI Badung, Bali I Nyoman Giri Prasta memberikan dana apresiasi sebesar Rp100 juta kepada atlet penyandang disabilitas Ni Kadek Dwi Purwaningsih yang telah berhasil meraih prestasi dalam ajang Special Olympics World Games (SOWG) 2023 di Berlin, Jerman.

"Saya atas nama pribadi, pemerintah dan seluruh masyarakat Badung sangat bangga dan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kadek Dwi Purwaningsih dalam ajang bergengsi SOWG sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Indonesia di mata dunia," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Jumat.

Saat mengikuti ajang Special Olympics World Games (SOWG) 2023, Ni Kadek Dwi Purwaningsih asal Jimbaran, Badung berusia 21 tahun itu mengikuti cabang senam ritmik dan berhasil meraih dua medali yaitu satu medali emas dan satu medali perunggu.

Atas prestasi itu Bupati Giri Prasta mengaku sangat mengapresiasi perjuangan Kadek Dwi yang telah berkompetisi dan berjuang dengan penuh semangat tinggi untuk meraih prestasi olahraga di kancah internasional.

"Kami juga mengharapkan Kadek Dwi Purwaningsih ini dapat terus mengembangkan diri dan membangun kepercayaan diri untuk terus meraih prestasi demi bangsa dan negara," kata Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, pendamping dari Special Olympics Indonesia (SOIna) Bali Made Murdani mengungkapkan pihaknya sangat berterima kasih kepada jajaran Pemkab Badung yang telah memberikan perhatian yang begitu besar serta dukungan dana bagi atlet disabilitas asal Badung itu.

Ia menjelaskan prestasi dunia yang diraih atlet Kadek Dwi Purwaningsih berawal tahun 2022 lalu, saat Kadek Dwi bersama 21



Bupati Nyoman Giri Prasta menerima kedatangan atlet penyandang disabilitas Ni Kadek Dwi Purwaningsih yang berprestasi dalam ajang SOWG 2023 dan menyerahkan bantuan dana, Jumat (12/1/2023) di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

atlet Bali mengikuti PeSOInas tingkat nasional di Semarang.

Pada ajang tersebut atlet asal Bali berhasil meraih 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu. Selanjutnya, dari semua atlet Bali itu, Kadek Dwi Purwaningsih terpilih menjadi salah satu atlet nasional mewakili Indonesia

mengikuti SOWG di Berlin, Jerman bulan Juni 2023.

Ajang olahraga empat tahunan itu merupakan ajang khusus bagi yang mengalami hambatan intelektual dan down sindrom. Pada ajang itu Kadek Dwi mengikuti dua cabang senam yakni senam hup dan senam pita. (adv)

Bupati Giri Prasta Resmikan IPA Estuary Perumda Air Minum Tirta Mangutama



Bupati Giri Prasta (tiga kanan) meresmikan IPA Estuary Perumda Air Minum Tirta Mangutama. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

SEBAGAI upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan ketersediaan air bersih di masyarakat, Pemkab Badung melalui Perusahaan Minum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung melakukan inovasi dalam pengolahan air di IPA Estuary Suwung, Jumat (5/1/2024), Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta

meresmikan dua inovasi tersebut, yaitu berupa sistem Membrane Bioreactor dan Decouler Sistem di Instalasi Pengelolaan Air Estuary.

Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa ketersediaan air bersih merupakan hal wajib dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karenanya, Pemerintah

Kabupaten Badung senantiasa memperhatikan hal tersebut.

Apalagi dalam amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 sudah jelas dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya yang ditempuh Pemkab Badung adalah melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan air dengan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

"Dengan sistem Membrane Bioreactor dan Decouler ini maka produksi kita tingkatkan. Awalnya bisa menyelesaikan 500 liter per detik, sekarang mampu menyelesaikan 750 liter per detik. Di bulan Juni kedepan kita siapkan lagi 250 liter per detik, sehingga nantinya mencapai 1000 liter per detik untuk kedepannya. Kita targetkan 2000 liter per detik untuk kawasan Kuta dan Kuta Selatan," ujarnya

Dipaparkannya, kebutuhan pembiayaan di sektor air minum tidaklah kecil. Partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan air minum dengan skema Business to Business (B to B) merupakan suatu peluang dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk itu ia berterimakasih kepada pihak ke 3, terutama dari PT Tiara Cipta Nirwana yang telah menyediakan teknologi pengolahan air baku dengan teknologi tinggi, sesuai regulasi diperbolehkan dengan skema B to B, dengan catatan tidak keluar dari regulasi yang ada.

"Kami juga sudah mencoba olahan dari air minum ini yang sudah di uji lab agar bisa diminum langsung," tegasnya.

Dengan didukung inovasi teknologi, diharapkan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan publik. (adv)

Wabup Ketut Suiasa Hadiri Pelantikan Pengurus PDHI

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa mewakili Bupati menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali periode 2023-2027 dengan tema "PDHI Bali Solid Bersinergi Mewujudkan Kesehatan Masyarakat Melalui Kesehatan Hewan Yang Tangguh" bertempat di Ruang Rapat Kertha Gosana Puspem Badung, Sabtu (6/1/2024).

Pada kesempatan tersebut Pemkab Badung melalui Wabup Suiasa menerima plakat dari Ketua PDHI periode 2023-2027 drh Dewa Made Anom.

Wabup Ketut Suiasa mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung memberikan apresiasi, bangga dan senang bahwa PDHI

khususnya PDHI Cabang Bali telah mampu menunjukkan serta membuktikan diri sebagai organisasi yang dinamis, karena sudah mampu melaksanakan konsolidasi organisasinya melalui proses-proses musyawarah.

"Terjadinya proses pelantikan pengurus sekarang ini adalah suatu hasil produk dari proses musyawarah. Dimana dalam musyawarah PDHI Cabang Bali tentu akan dibahas terkait dengan pertanggungjawaban pengurus lama, penyusunan rencana kerja dan peninjauan terhadap pengurus itu sendiri. Dengan terlaksananya pelantikan pengurus, suatu bukti bahwa kedinamisan dan bukti konsolidasi PDHI Cabang Bali sudah terlaksana dengan baik, tentu atas dasar binaan,



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali periode 2023-2027 di Ruang Rapat Kertha Gosana Puspem Badung, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

motivasi dan arahan dari Pusat," ujarnya.

Pemkab menyambut baik dan merasa senang karena bisa berkontribusi, bekerjasama dengan seluruh dokter hewan se-Bali bersinergi dengan Ketua Umum PB-PDHI Pusat ini merupakan suatu momentum untuk menguatkan komitmen agar kinerja pemerintah, masyarakat bersama PDHI Cabang Bali.

"Dokter hewan memiliki peran krusial setidaknya ada 3 hal, pertama dokter hewan kami ajak dan senantiasa menjaga dan memonitor tentang pangan ternak

yang baik dan berkualitas, kedua kami ajak dalam penanganan penyakit yang disebut dengan zoonosis, karena ini juga akan menyelamatkan manusia seperti dalam penanganan PMK, Rabies, LSD dan ASF, terakhir tidak kalah pentingnya dokter hewan kita ajak untuk memberikan atensi, perhatian pada hewan-hewan peliharaan kesayangan masyarakat mengingat masyarakat kita banyak sekali penghobi memelihara binatang, astungkara semua tantangan dan penyakit hewan di Badung bisa dikendalikan," kata Suiasa. (adv)

Sekda Adi Arnawa : Pariwisata Badung Berbasis Sustainable Tourism dan Berlandaskan Spirit Budaya



Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Bupati Siak Provinsi Riau bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Siak, bertempat di Puspem Badung, Senin (8/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMBANGUNAN pariwisata yang berhasil bukan hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, lebih dari itu, jika pariwisata dikelola secara baik, pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal.

Untuk itu, dalam pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism).

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pari-

wisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan. Dengan tetap memegang teguh nilai dan spirit budaya lokal Bali

"Ini membutuhkan suatu inovasi yang out of the box. Untuk menjadikan industri pariwisata sustainable, ini merupakan suatu konsep yang dipraktikkan dan di maintenance baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung, masyarakat, pelaku industri dan semua komponen yang ada didalamnya. Dan terbukti pariwisata telah memberikan dampak dimensional," demikian disampaikan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa saat mewakili Bupati Giri Prasta menerima kunjungan kerja Bupati Siak Provinsi Riau H. Alfredi bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Siak, Senin (8/1/2024) bertempat di Puspem Badung.

Ditambahkan Adi Arnawa,

dalam masa kepemimpinan Bupati Giri Prasta dan Wabup Ketut Suiasa di Kabupaten Badung terdapat 4 (empat) pilar utama pengembangan pariwisata yang mencakup pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Management), pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (Social-Economy), pelestarian budaya bagi masyarakat (Culture) dan pelestarian lingkungan (Environment).

Kinerja pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian pertanian / lingkungan, pengembangan budaya serta pemerataan persatuan ditengah perbedaan dan heterogenitas masyarakat Badung. (adv)

Wabup Suiasa Dampingi Menparekraf Sandiaga Uno pada Acara Kelana Nusantara

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pada acara Kelana Nusantara, dengan tema “Kolaborasi Ekraf Bali untuk Pariwisata Bali” di Badung, Kamis (11/1/2024).

Wabup Suiasa menyampaikan terima kasih kepada Menparekraf RI Sandiaga Uno yang telah banyak berbuat dan memberi inspirasi khususnya dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali terkhususnya lagi di kabupaten Badung.

Suiasa menjelaskan, dalam menggerakkan sektor UKM di Badung, pihaknya telah mengambil kebijakan melalui gerakan program di bidang ekonomi kreatif. Pertama, mulai awal 2024 ini Pemkab Badung akan memberikan subsidi kredit KUR bagi UKM, dengan nilai kredit sebesar 25 juta.

Dimana dalam pengajuan kredit, pelaku UKM tidak dikenakan biaya bunga, biaya provisi

maupun biaya administrasi.

“Kami persilakan UKM di Badung memanfaatkan program KUR ini. Di Awal kami berikan 25 juta dulu sebagai motivasi. Bila lancar, nanti platformnya ditingkatkan. Untuk biaya bunga, provisi dan administrasi kita tanggung dari APBD Kita bantu selama 2 tahun ke depan dan kami harapkan UKM pinjaman di Bank BPD Bali,” jelasnya.

Yang kedua kata Suiasa, Pemkab Badung merencanakan membuat program bebyar sertifikat halal untuk UKM. Program ini akan dimulai pada anggaran perubahan 2024 nanti.

Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Badung serta seluruh stakeholder ekonomi kreatif yang telah berkolaborasi sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang semakin kuat dan sektor pariwisata yang kembali bangkit pasca pandemi.



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan) mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kiri) pada acara Kelana Nusantara, di Badung, Kamis (11/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Melalui Kelana Nusantara ini, Kemenparekraf ingin adanya sinergi program dengan daerah, seperti dendam badung yang telah melaksanakan program hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal dan KUR untuk UMKM.

Demikian pula program-program infrastruktur, karena di ekonomi kreatif sangat tergantung

dengan infrastruktur.

“Kelana adalah mempesona karena selalu memberi solusi atas dasar kolaborasi. Kami juga menyambut baik program badung dengan sertifikat halal dan KUR bagi UKM sangat luar biasa. Karena menjadi sebuah peluang bagi UMKM, ekonomi kreatif naik kelas,” terangnya. (adv)

Wabup Suiasa Pimpin Rakor Persiapan Pelaksanaan Upacara Melasti dan Tawur Agung Kesanga



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Upacara Melasti serta Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1946 bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (11/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

WABUP Suiasa usai pelaksanaan rapat koordinasi menengangkan, rakor persiapan ini membahas beberapa kegiatan bersama sejumlah pihak agar di Badung agar seluruh rangkaian brata penyepian dapat berjalan dengan tertib, aman, khusyuk,

nikmat dan berkualitas. Kelancaran dari proses penyelenggaraan ini menjadi komitmen bersama agar setiap tahun dapat meningkatkan kualitasnya. Baik kualitas dari umat menyelenggarakannya, maupun moralitas bagi umat yang lain sebagai

wujud toleransi terwujudnya seluruh rangkaian Nyepi.

“Bagian terpenting yang menjadi usulan kita sekarang adalah serangkaian kegiatan kita akan melaksanakan brata penyepian, dan di bulan Februari kita akan melaksanakan kewajiban kenegaraan yakni pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan di Badung, pembuatan ogoh-ogoh di balai banjar kita sepakati bahwa penggunaan balai banjar sebagai TPS sebagai prioritas utama. Di satu sisi, diatur sedemikian rupa agar dapat berjalan seirama dan berjalan dengan sebaik-baiknya, agar tidak mengganggu baik penyelenggaraan pemilu maupun pembuatan ogoh-ogoh,” ujarnya.

Wabup Suiasa melanjutkan, dalam pelaksanaan ogoh-ogoh di Badung akan dilaksanakan

penilaian, pembuatannya maupun parade dan sebagainya. Sedangkan untuk di desa akan diserahkan ke masing-masing desa, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa adat masing-masing.

“Kami meminta dalam melaksanakan lomba atau parade ogoh-ogoh diupayakan untuk tidak menggunakan jalan utama, sehingga demikian desa adat dapat membuat rekayasa lalu lintas bekerjasama dengan pihak kepolisian dan untuk waktu maksimal pukul 22.00 Wita. Dengan demikian tidak ada sampai larut malam. Nanti desa adat setempat dapat mempersiapkan berdasarkan jumlah, durasi waktu yang sudah di rekayasa sedemikian rupa harapannya dapat berjalan dengan baik,” ucapnya. (adv)

Bupati Gianyar Kunjungi 44 TPS3R Untuk Serap Masalah dan Kiat Sukses

PENJABAT Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa mengunjungi 44 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, untuk menyerap berbagai aspirasi, termasuk masalah dan kiat sukses dari masing-masing lokasi.

“Saya akan mengunjungi semua TPS3R yang jumlahnya mencapai 44 tempat untuk menyerap apa kendala dan apa kunci sukses dari masing-masing TPS3R. Sehingga nanti bisa dirumuskan dalam sebuah kebijakan percepatan pelaksanaan sehingga keberhasilan ini bisa segera dinikmati,” ujarnya saat mengunjungi tempat pengolahan sampah di TPS3R Desa Keliki, Tegalalang.

Tagel Wirasa dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Sabtu, menyampaikan bahwa masalah sampah merupakan masalah bersama yang sulit untuk diselesaikan. Namun, Provinsi Bali telah

memiliki kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan TPS3R. Bahkan, Kabupaten Gianyar telah memiliki 44 TPS3R yang tersebar di masing-masing desa yang ada di Gianyar.

“Kita sudah punya 44 TPS3R atau hampir 80 persen dari desa kita di Gianyar dan kita harapkan yang pertama adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah karena sebenarnya tanggung jawab sampah itu adalah si penghasil sampah di rumah tangga,” katanya.

Tagel Wirasa juga mengatakan bahwa masalah sampah akan menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan baik.

“Sampah kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi bom waktu ke depan. Beberapa kejadian sudah kita lihat bersama, kemarin di TPA Suwung hampir sebulan lebih itu ada kebakaran yang sulit ditanggulangi,” ujarnya.

Apalagi, menurut dia, arah kebijakan ke depan adalah seluruh



Penjabat Bupati Gianyar, Bali, Dewa Tagel Wirasa sedang meninjau tempat pengolahan sampah di Desa Keliki, Tegalalang. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar)

TPA akan ditutup, sehingga tidak ada lagi TPA.

Ia berharap masyarakat menyadari bagaimana mengelola sampah untuk memelihara lingkungan.

“Jadi intinya kesuksesan itu baru bisa akan terjadi ketika masyarakat memiliki kesadaran

memilah sampahnya dari rumah,” katanya.

Birokrat asal Tampaksiring tersebut juga menekankan bahwa program TPS3R di Gianyar sudah bagus dan sudah bekerja sama dengan Puspa Aman dan Aku Hatinya yang digerakkan oleh PKK. **(ant)**

Pemkab Tabanan dan Lampung Timur Sepakat Kolaborasi Seni, Adat Dan Budaya



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya didampingi jajaran saat melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung belum lama ini. ANTARA/HO-Pemkab Tabanan.

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tabanan, Bali, bersama Pemkab Lampung Timur sepakat berkolaborasi dalam bidang seni, adat, dan budaya.

“Dalam menyempurnakan perwujudan visi dan misi Tabanan Era Baru, melalui pelestarian seni, adat, agama, dan budaya,

diperkuat dengan kolaborasi yang dijalin dengan Pemkab Lampung Timur,” kata Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Tabanan, Sabtu.

Kesepakatan tersebut saat pihaknya berkunjung ke Provinsi Lampung belum lama ini untuk melihat potensi pertanian dan pa-

riwisata di Lampung. Menurutnya, potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur dan Tabanan mirip yakni 80 persen bergerak di bidang pertanian.

“Walaupun kami berdampingan dengan sektor pariwisata seperti di Kabupaten Badung dan Denpasar, tetapi ada kemiripan karena juga bergerak di sektor pertanian. Kami juga sembahyang bersama. Tujuannya bagaimana kami melakukan kolaborasi dan akulturasi antara budaya Bali,” ujarnya.

Selain itu banyak warga Bali yang dulu bertransmigrasi ke Lampung sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an dan mereka masih kuat menjaga budaya Bali yang dibuktikan dengan keberadaan pura, adat istiadat, seni, dan budaya.

“Saya apresiasi saudara-saudara kami di Lampung, kurang lebih ada 1,25 juta masyarakat

Bali di Lampung. Kami berikan motivasi agar bersama-sama tidak melupakan warisan leluhur budaya Bali walaupun merantau di Lampung. Saya juga pesankan, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung,” ucapnya.

Sanjaya berharap kekuatan yang saling menjaga suku, agama, budaya dan ras, yang ada di Lampung dan Bali. Ke depannya Pemkab Tabanan juga berharap pertanian dan pariwisata Lampung dan Bali bisa terus berkembang.

Sementara itu Kelian Adat Desa Sidorejo Lampung Timur, Nengah Pasek Suci, mengatakan kehadiran jajaran Pemkab Tabanan memberikan semangat umat Hindu di daerah itu yang bertransmigrasi ke Lampung sejak tahun 1963.

“Semoga kehadiran jajaran Pemkab Tabanan dapat memberikan kerahayuan dan keselamatan,” katanya. **(ant)**

Bupati Bangli Lantik 74 Pejabat Struktural Untuk Penyegaran

BUPATI Bangli Sang Nyoman Sedana Arta melantik sebanyak 74 pejabat struktural dalam rangka penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkab Bangli, Provinsi Bali.

"Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan komisaris Bank Daerah Bangli dan penyerahan SK P3K kepada para pegawai yang berhasil lolos seleksi P3K," kata Bupati saat pelantikan, demikian siaran pers Diskominfo Bangli, Sabtu.

Ia berharap para ASN ini selalu dapat menggelorakan semangat "Jengah" membangun Bangli, serta dapat menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik di lingkungan kerja masing-masing.

"Kami yakin, dengan diisinya jabatan-jabatan struktural oleh putra putri terbaik, ke depannya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel," katanya.

Selain itu, Bupati Sedana Arta juga mengucapkan selamat bertugas ke Komisaris Bank Daerah Bangli yang sudah dilantik.

"Bank Daerah Bangli adalah satu-satunya Bank milik Pemkab Bangli, merupakan Bank Daerah terbaik di Provinsi Bali, sehingga ke depannya diharapkan Bank Daerah Bangli ini mampu mengelo-



Bupati Bangli Sedana Arta membacakan sumpah saat pelantikan 74 pejabat Pemkab Bangli. ANTARA/HO-Pemkab Bangli

la keuangan daerah dengan baik demi kesejahteraan seluruh krama Bangli," ujar Bupati Bangli.

Pelantikan Pejabat Struktural tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Bangli, I

Wayan Diar, Sekda Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, Staf Ahli Bupati, serta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. (ant)

Pemkab Banyuwangi Akui Keterkaitan Inovasi Dengan Jembrana



Rombongan Pemkab Jembrana saat di Taman Nasional Baluran, Kamis (18/1). ANTARA/Gembong Ismadi

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengakui keterkaitan inovasi di daerah tersebut dengan Kabupaten Jembrana.

"Harus diakui beberapa inovasi bahkan yang diadopsi secara nasional, inisiasinya dari Kabupaten Jembrana," kata Asisten Administrasi Pemkab Banyuwangi Chairul

Ustadi saat menerima rombongan dari Kabupaten Jembrana, Jumat.

Secara pribadi, ia juga mengatakan, dulu dirinya serta banyak birokrat di Pemkab Banyuwangi belajar inovasi ke Kabupaten Jembrana.

Pernyataan itu ia sampaikan menjawab pertanyaan dari Kepala Bappeda Jembrana I

Made Sudantra dan Kepala BPKAD Jembrana Komang Wiasa, terkait inovasi Banyuwangi dalam branding daerah tersebut sehingga terkenal.

"Kebetulan saja Jembrana tidak melanjutkan inovasi yang sudah dilakukan, sehingga status daerah inovatif kami ambil alih. Tapi kalau Jembrana ingin melakukan hal itu sebenarnya tidak sulit, karena dulu Jembrana sudah dikenal sebagai daerah inovatif di Indonesia," katanya.

Branding atau merk daerah, kata dia, sangat tergantung pada penyematan identitas daerah tersebut yang berkaitan dengan potensi lokal yang original dari sisi geografi, budaya maupun kekhasan lainnya.

Dia mencontohkan penyalangan Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java, mengacu dari geografi daerah ini yang berada di ujung timur Pulau Jawa.

"Artinya matahari di Pulau

Jawa terbit pertama kali dari Banyuwangi. Posisi geografi itu yang kemudian kami gunakan untuk menyebut Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java," katanya.

Sebagai birokrat yang pernah belajar inovasi dari Jembrana, pihaknya berharap daerah tersebut bisa bangkit kembali sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Jembrana Made Sudantra mengatakan, pada awal bulan Februari di Jembrana akan diselenggarakan festival coklat sekaligus menetapkan daerah tersebut sebagai kota coklat.

"Branding terhadap coklat sebagai identitas komoditi pertanian Jembrana, karena kualitas coklat kami sudah diakui dunia internasional. Penetapan sebagai kota coklat serta festival coklat dilakukan pada bulan Februari bertepatan dengan momentum valentine," katanya. (ant)

Bank Sampah di Buleleng Tukarkan Sampah Dengan Belajar Gratis

BANK Sampah Kalibukbuk Bersih (Kaliber) Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali memiliki program tukar sampah dengan belajar gratis sebagai upaya mengatasi masalah sampah di daerah itu.

"Kami ingin mengajak warga masyarakat untuk sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan melalui program bank sampah. Selain itu, kami juga ingin mengajak masyarakat bahwa sampah juga bermanfaat, salah satunya dapat program belajar gratis," kata Direktur Bank Sampah Kaliber, Ketut Budiasa, di Singaraja, Rabu.

Ia menjelaskan, Bank Sampah Kaliber ini sudah eksis beroperasi sejak tahun 2017 hingga sekarang dengan system pengelolaan sampah anorganik dengan bernilai ekonomi.

Ketut Budiasa menuturkan awal di bentuknya Bank Sampah

Kaliber ini hanya mengikuti sosialisasi tentang sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, dimana baginya sampah merupakan masalah serius yang menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, dirinya berupaya untuk membuat suatu terobosan dimana sampah yang selama ini terbuang percuma bisa bernilai ekonomi yang tinggi.

Pada 2017 silam, Budiasa memberanikan diri mencoba untuk mengubah pemikiran di masyarakat bahwa sampah juga memiliki nilai jual, untuk itu dibuatkanlah program Bank Sampah ini, selain bertujuan untuk mendapatkan uang juga dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan memilah sampah yang ada di rumah.

Tidak disangka olehnya, kehadiran Bank Sampah ini disambut hangat oleh warga Kalibukbuk Lovina. Banyak masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Sampah Kaliber,

baik sebagai nasabah individu maupun nasabah kelompok.

Masyarakat pun bisa mendapatkan beberapa keuntungan saat menjadi nasa-

bah di Bank Sampah ini.

Di antaranya, hasil penukaran sampah bisa diambil dalam bentuk uang maupun tabungan. Tidak hanya tabungan berupa uang, program dari Bank Sampah Kaliber ini juga memiliki kegiatan belajar, menari dan megambel dengan menukarkannya dengan sejumlah sampah yang sudah disepakati jenisnya.

"Mekanismenya, hanya dengan menukarkan sampah, masyarakat sudah bisa mengikuti program belajar, di hari Sabtu dan Minggu," imbuhnya.

Budiasa mengaku, sudah ada sekitar 85 anak yang mengikuti program belajar itu, karena secara tidak langsung istri dari Budiasa juga adalah seorang guru. **(ant)**



Direktur Bank Sampah Kalibukbuk Bersih (Kaliber) Ketut Budiasa. ANTARA/HO-Diskominfosanti Buleleng

Warga di Denpasar Semangat Gunakan Hak Pilih Berkat Kemudahan Pindah TPS



Masyarakat sedang mengurus pindah memilih di Kantor KPU Denpasar, Denpasar, Bali, Senin (15/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

SALAH satu warga di Denpasar, Bali, bernama Stevany Fentiana (35) memutuskan tak lagi menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu 2024, lantaran ketika tiba di Kantor KPU Denpasar ia dihadapkan dengan kemudahan proses pindah TPS, tempat mencoblos.

"Sejauh ini saya merasa ini sangat gampang daripada yang sebelum-sebelumnya, waktu itu saya golput karena banyak syarat dan ketentuan, jadi ini pindah memilih pertama kali sebelumnya tidak ikut pemilu karena prosesnya panjang saya lebih baik tidak usah milih,"

kata dia usai mengajukan pindah memilih di Denpasar, Senin.

Pada hari terakhir pengajuan pindah memilih berdasarkan sembilan kondisi, Stevany datang ke Kantor KPU Denpasar membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga berserta salinannya, juga surat keterangan kerja dari perusahaannya di Denpasar.

Ia bercerita hanya butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan pemberkasan, namun yang menyita waktu adalah proses mencari tahu nama banjar atau lingkungan tempat tinggalnya saat ini untuk memudahkan penyelenggara menentukan tps nanti.

Melihat proses ini, perempuan asal Banyuwangi tersebut akhirnya turut merekomendasikan rekan-rekannya agar mengajukan pindah memilih dan tidak menyalahkan hak suara.

"Betul ini meningkatkan niat saya untuk memilih, bahkan saya sempat bilang ke teman-teman saya agar jangan sampai golput karena syaratnya gampang banget, dan untuk pengumpulan formulirnya juga hari ini sampai jam 12 malam jadi bisa nanti pulang kerja," ujarnya.

Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni mengatakan minat warga mengurus pindah memilih memang terlihat tinggi, mengingat Pemilu 2024 juga menggunakan sistem informasi data memilih (Sidalih) yang membuat proses lebih mudah.

Rata-rata dalam satu hari setidaknya 200 orang mengurus proses pengajuan, dan hingga pagi ini KPU Denpasar mencatat 1.542 pemilih yang pindah masuk ke Denpasar dan 1.726 pemilih yang pindah keluar. **(ant)**